



3.270 KK Segera Terima KMS

Dinsos Berharap Peran Aktif Pengurus RT/RW

YOGYAKARTA – Hingga akhir April ini, sebanyak 3.270 kepala keluarga (KK) menjadi target uji publik tahap pertama sebagai calon penerima kartu menuju sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta 2018. Jumlah tersebut merupakan data usulan dari masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan, uji publik tahap

pertama berlangsung sejak 12 April hingga 28 April mendatang. "Selain menguji data usul-

an warga, kami juga menguji data sekitar 18.651 KK. Semua data diuji bersama-sama," katanya, kemarin.

Menurut Hadi, uji publik ini untuk memastikan apakah masih ada warga dari kalangan keluarga miskin yang belum masuk dalam daftar usulan sebagai calon penerima KMS tahun depan. Dia pun berharap peran aktif dari pengurus RT/RW agar turut memantau dan membe-

rikan masukan maupun usulan.

Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, lanjutnya, jumlah usulan baru dari wilayah mengenai calon penerima KMS bisa mencapai sekitar 5.500 (KK). "Mungkin saja masih ada warga yang tercecer dan belum masuk dalam daftar usulan," kata Hadi.

Hasil uji publik tahap pertama nanti bakal menjadi bekal Dinsos untuk melakukan verifikasi

kasi di lapangan berdasarkan parameter dan indikator yang sudah ditetapkan. Parameter yang dipakai menyangkut tujuh aspek dan 17 indikator penilaian. Di antaranya meliputi pendapatan kepala keluarga, status tempat tinggal, hingga kemampuan membeli sandang dan pangan. "Untuk proses verifikasi data di lapangan dijadwalkan mulai awal Juni mendatang," katanya.

Diketahui, KMS tahun ini yang dibagikan kepada warga miskin bisa untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Terbagi atas tiga golongan, yaitu KMS 1 yang digunakan oleh fakir miskin sebanyak 17 KK, KMS 2 atau golongan miskin sebanyak 5.308 KK, dan KMS 3 yang digunakan oleh warga rentan miskin sebanyak 13.326 KK.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto berharap tak ada warga miskin yang tercecer dari haknya mendapat KMS dalam uji publik tahun ini. Selain itu, Dinsos harus benar-benar cermat melakukan verifikasi. Sebab, komisinya mendapat keluhan dari masyarakat bahwa ada indikasi KMS 2016 yang tidak tepat sasaran.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005